

SULTAN: TANGANI KLASTER BARU DENGAN TEPAT

Wisata Pascalibur Lebaran, Jangan Lupakan Prokes

YOGYA (KR) - Munculnya sejumlah klaster penularan Covid-19 di Kabupaten Sleman harus dijadikan perhatian dan bahan evaluasi semua pihak.

Adanya klaster Covid-19 tersebut selain menjadi indikator dari penegakan protokol kesehatan (prokes) yang kurang bagus, juga menjadi gambaran bahwa saat momentum atau liburan Idul Fitri kemarin ego masyarakat masih tinggi, terutama untuk melakukan kegiatan halal bihalal atau bertemu teman. Masih banyaknya warga yang abai terhadap aturan penegakan prokes ini pun disayangkan sejumlah pihak termasuk Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Kalau dilihat dari munculnya klaster baru di Sleman, ego masyarakat untuk tetap bertemu dan melakukan tatap muka saat pandemi masih tinggi. Padahal ketika masyarakat

menunda tatap muka, berarti mereka tidak hanya menjaga diri sendiri tapi juga orang lain. Namun dalam hal ini, kecenderungannya ada kondisi masyarakat tidak peduli. Jadi egonya masih tinggi, mau Syawalan atau bertemu dengan teman," kata Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (31/5).

Sultan berharap klaster di Sleman tidak merembet ke lokasi lain. Karena itu Pemkab Sleman diminta segera mengambil langkah tepat untuk menekan laju penularan agar tidak semakin meluas. Caranya bisa dengan menegakkan prokes, sampai melakukan swab kalau ditemukan indikasi penularan.

"Saya kira yang lebih meng-

khawatirkan lagi, apabila kejadian ini (klaster baru) tidak membuat masyarakat jera dan menyesal. Paling-paling dengan kejadian ini kan (tanggapannya) 'Iho kok ngene'. Tapi tidak memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak hanya tidak memenuhi aturan, tapi saya khawatir mereka tidak pernah menyesali tindakan mereka," ungkap Sultan.

Sedangkan Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji akan mengingatkan kembali Satgas Covid-19 di lingkungan terkecil baik di Padukuhan ataupun RT supaya cermat menegakkan aturan berdasarkan pengalaman kasus bertambahnya klaster-klaster Covid-19 di Sleman belum lama ini. Peraturan Gubernur hingga Peraturan Bupati sudah ada sehingga perlu ditegaskan kembali hingga lingkup terkecil yaitu tingkat RT. **(Ria/Ira)-d**

Bung Karno

Dalam catatan sejarah, Bung Karno membacakan usulan dasar negara dengan nama Pancasila dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan).

Dikutip dari laman Kemendikbud, Soekarno atau Bung Karno diasingkan di Ende, Pulau Flores, sejak 14 Januari 1934 sampai 18 Oktober 1938.

Pemerintah Belanda mengasingkan Bung Karno ke Ende didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sebab, saat itu Bung Karno adalah tokoh yang secara terang terang memperjuangkan kemerdekaan daerah jajahan Belanda.

Namun justru pada masa pengasingan inilah Bung Karno bisa merumuskan butir-butir Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bung Karno

mendapatkan inspirasinya saat sedang merenung di bawah pohon sukun, yang kini menjadi taman Kota Ende.

Kala itu, Bung Karno mendapatkan buah pemikiran tentang Pancasila dari lima cabang yang terdapat dalam pohon sukun tersebut.

"Di kota ini kutemukan lima butir mutiara, di bawah pohon sukun ini pula kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila," ujar Bung Karno kala itu. **(Jon)-d**

Jauhi

alam pikiran, dan moralitas Pancasila," tegas Haedar.

Kedua, Pancasila harus menjadi pedoman hidup berbangsa bagi seluruh komponen dan warga bangsa, elit bangsa dan masyarakat. "Pancasila tidak cukup hanya dihapal, menjadi doktrin, dan pemikiran, Pancasila harus kita praktikkan dan kita warga bangsa, elit bangsa dimanapun berada dan dalam posisi apa pun harus menjadi contoh teladan di dalam mempraktikkan Pancasila, menjadi insan-insan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, Berperikemanusiaan yang adil dan beradab, Berpersatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh

hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata ber menunjukkan kata kerja, artinya Pancasila dijadikan praktik nyata dalam berbangsa dan bernegara," ujar Ketum PP Muhammadiyah.

Presiden Joko Widodo saat bertindak selaku inspektur upacara pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (1/6) mengajak masyarakat mengkokohkan nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan dalam bernegara. Pancasila telah menyatu

dalam kehidupan bangsa sepanjang Republik Indonesia berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Contohnya globalisasi dan interaksi antarbelahan dunia, yang tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan.

Presiden meminta seluruh pihak mewaspadai meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antarpandangan, rivalitas antarnilai-nilai dan rivalitas antarideologi. Ideologi transnasional, kata Presiden, juga cenderung semakin meningkat memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. **(Fsy/Sim)-f**

Sekolah

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Kabupaten Bengkulu Tengah dengan pihak sekolah. Siswa dikembalikan ke orang tuanya untuk dibina.

Apapun diksi yang dipergunakan, dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina menunjukkan fakta bahwa siswa dikeluarkan dari sekolah. Terlepas dari kesalahan yang diperbuat sehingga menjadi sebab dikeluarkan dari sekolah, ada baiknya dikaji lebih dalam konsep dasar mendidik persekolahan kita. Sebagai bentuk pembelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.

Belajar dari kasus Bengkulu, ada aspek konsep dasar pendidikan yang diingkari sekolah. Mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Jika dalam prosesnya ditemui penyimpangan, maka tugas pendidikan adalah mengembalikan kepada jalur yang benar.

Dari media massa kita mendapat informasi, keputusan mengembalikan siswa kepada orangtuanya untuk dibina merupakan penerapan sanksi atas pelanggaran tata tertib sekolah yang sebelumnya sudah disepakati semua pihak. Akumulasi poin pelanggaran tata tertib sekolah sudah melampaui ketentuan yang ada.

Alur berpikir dengan dalih kesepakatan sebagai pembenar dalam mengambil keputusan bisa diterima karena masuk akal. Tetapi, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa persekolahan kita sedang

terjebak pada kubangan pragmatisme sempit yang menganggangi falsafah pendidikan sepanjang hayat. Menggunakan hukuman sebagai alat pendidikan sangat mungkin diterapkan. Tetapi, apakah kriteria menjatuhkan hukuman yang mendidik sudah dipenuhi?

Sebagai dasar pijakan menganalisis, marilah kita gunakan konsep dasar pendidikan nasional yang sendiri-sendinya diletakkan oleh Ki Hadjar Dewantara (KHD). Menurut KHD, hukuman sebagaimana juga ganjaran, adalah alat pendidikan. Hukuman dan ganjaran sebagai alat pendidikan sangat tergantung kepada maksud dan tujuannya. Hukuman dan ganjaran diberikan seharusnya hanya untuk menunjukkan buahnya perbuatan. Perbuatan baik berbuah baik, perbuatan buruk berbuah buruk. Dengan demikian tidak ada alasan menjatuhkan hukuman untuk membuat jera.

Agar hukuman melekat di dalamnya sifat mendidik, maka harus dipenuhi tiga syarat mutlak. Lalah, hukuman harus (1) sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya, (2) segera dijatuhkan tanpa ditunda dan tanpa diakumulasi dengan kesalahan yang lainnya, dan (3) adil, bagi siapapun tidak memandang latar belakang status sosial, ekonomi, budaya, dan asal-usul. Dalam kasus Bengkulu, jatuhnya hukuman mungkin dapat memenuhi kriteria butir (1) dan (3). Tetapi tidak untuk butir (2). Sistem poin yang dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sesungguhnya pengaku-

mulasian atas kesalahan-kesalahan selama ini. Mungkin kesalahan-kesalahan sebelumnya itu sudah jatuh pula sanksinya.

Tugas pendidikan itu sangat mulia. Tugas mulia inilah yang diemban para pendidik dan tenaga kependidikan yang direpresentasikan dalam lembaga pendidikan bermama sekolah. MJ Langeveld menyatakan, pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.

Apabila mengeluarkan siswa dari sekolah masih dipergunakan dalam praktik pendidikan, maka tugas mulia pendidikan itu telah gagal diemban sekolah. Setidaknya sekolah yang merepresentasikan sebagai manusia dewasa telah gagal membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Selain itu sekolah telah gagal membangun budaya sekolah yang menuntun segala kekuatan kodrat anak didik agar menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pantas kiranya sekolah gagal semacam ini tidak terakreditasi. Berapapun nilai capaian hasil akreditasinya. **(Penulis adalah Pamong Tamansiswa dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi DIY)-d**

MERAJUT KEBERSAMAAN DALAM PERBEDAAN

Kemenag Gencarkan Moderasi Beragama

TEMANGGUNG (KR) - Kemenag menggencarkan moderasi beragama untuk merajut kebersamaan dalam kehidupan beragama. Agama jangan lagi dikesankan sebagai sesuatu yang keras dan tidak ramah. Dengan demikian, moderasi beragama sesungguhnya bagaimana beragama di tengah-tengah perbedaan. Jangan merasa menang dan benar sendiri, Bila ada permasalahan dimusyawarahkan penyelesaiannya.

Demikian disampaikan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Prof Achmad Gunaryo saat ditemui di sela-sela Road Show Jagongan Moderasi Beragama Umat Buddha bertajuk 'Beragama dengan Ramah untuk Indonesia' dan Pengukuhan Penyuluh Lintas Agama (Pelita) di Dusun Kreeck Desa Getas, Kecamatan Kaloran Temanggung, Selasa petang (1/6).

"Moderasi di Jateng telah digelar di Temanggung dan Klaten, selanjutnya di Tegal dan meluas ke seluruh Indonesia," kata Prof Achmad Gunaryo. Ia mengatakan, pada tahun 2022 dijadikan sebagai tahun kerukunan, untuk mencapainya tak sekadar dialog antarumat beragama, tetapi dengan berbagai program di antaranya penerbitan buku dan pementasan seni budaya.

Untuk direktorat lain, terangnya, di bidang pendidikan ada perbaikan kurikulum untuk toleransi dan moderasi. "Kita mengajarkan perilaku pada semua pihak. Kita ini sedang mera-



KR-Zaini Arrosyid
Road Show Jagongan Moderasi Beragama Umat Buddha menghadirkan Prof Achmad Gunaryo, Al Khadziq, dan Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf).

jut kembali kebhinekaan," katanya.

Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan, jagongan moderasi keberagaman sangat baik, yakni untuk membahas keberagaman dan menyatukan berbagai pandangan yang berbeda-beda. "Kita bisa sama-sama membangun kesadaran. Minimal kesadaran peserta jagongan yang sekarang terbatas pada tokoh agama, tetapi harapannya bisa diteruskan kepada umat beragama," ujar Bupati. **(Osy)-d**

Sultan:

Bagaimana dengan pengalaman kemarin itu, menjadikan teman-teman pedagang kakilima (PKL) di sana mengkoordinasikan potensi yang ada, jangan hanya bicara Malioboro saja, tapi lingkungan atau kawasan di sekitarnya juga bisa dikomunikasikan," kata Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (31/5).

Sultan menyatakan, kemunculan video viral soal harga pecel lele yang dinilai tidak wajar, perlu dijadikan perhatian semua pihak. Untuk itu Sultan berpesan agar para pedagang tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat dengan *nuthuk* atau menaikkan harga. Karena cara seperti itu justru membuat pedagang kehilangan pelanggan.

"Pedagang yang *nuthuk* maunya untung be-

Sambungan hal 1

sar, tapi setelahnya *durung karuan payu meneh* (belum tentu laku lagi). Jadi lebih baik kalau orang jualan itu untung secukupnya, tapi jumlah pelanggan semakin bertambah banyak. Bukan sebaliknya, *nuthuk* dan mendapatkan untung besar tapi besok tidak ada yang makan lagi," ungkap Sultan.

Sultan berharap supaya wisatawan atau pengunjung merasa nyaman dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Alangkah baiknya jika standar harga di Jalan Perwakilan bisa sama seperti yang sudah dilakukan di Jalan Malioboro. Dengan begitu, baik pedagang maupun wisatawan atau pengunjung bisa merasa nyaman saat berkunjung di kawasan tersebut. **(Ria)-f**

Pemberantasan

kewajiban di mana kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata KPK Firlil Bahuri.

Ia juga menegaskan, tiap tindakan pegawai KPK harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Hal itu diperlukan agar independensi pegawai KPK tidak tergerus. KPK, berpedoman teguh terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap istikomah, independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dalam melaksanakan tugas. Independensi KPK, menurut Firlil, harus tetap ada. Selain itu, pegawai KPK tidak boleh berkhianat saat bertugas karena menumpu harapan masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tidak ketinggalan Firlil juga meminta para pegawai terus memberantas korupsi selama bergabung dengan KPK. Pemberantasan korupsi diminta tidak meredup hanya karena menjadi ASN. "Kami pesan, setiap insan KPK teruslah berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi tanpa pengaruh dari kekuasaan apapun," tegasnya.

Harapan juga disampaikan Firlil kepada pegawai KPK yang dipimpinnya, memberantas korupsi di Indonesia ini seperti perang badar. "Karena

Sambungan hal 1

ada materi yang membenarkan Pancasila dan ajaran agama," kata Ketua DPW PKS DIY Agus Mas'udi usai syawalan yang berlangsung di Kantor DPW PKS DIY, Selasa (1/6).

Agus menjelaskan, Pancasila dan konstitusi Indonesia selama ini telah menjamin setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya. "Kami juga beberapa kali diajak sejumlah elemen masyarakat antikorupsi mengenai hal ini. Namun sikap partai sudah jelas. Sudah diwakili DPP dan wakil rakyat di DPR," ujarnya. **(Ful/Awh/Dev)-d**



Prakiraan Cuaca Rabu, 2 Juni 2021								
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban		
Bantul					24-31	60-95		
Sleman					23-31	65-95		
Wates					24-31	60-95		
Wonosari					23-31	65-95		
Yogyakarta					23-31	65-95		
	Cerah		Berawan	Udara Kabur		Hujan Lokal		Hujan Petir

Alfriadi Dwi Atmoko, S.E., M.Si., Ak., CA
Dosen Akuntansi
Universitas Amikom Yogyakarta

TAHUN 2021 menjadi tahun kedua pandemi Covid-19 bagi seluruh negara di Dunia, termasuk Indonesia. Pandemi yang panjang ini membuat pergerakan ekonomi menjadi tidak stabil. Angka positif Covid-19 tidak kunjung mengalami penurunan, bahkan angka

Dampak Ekonomi Akibat Pelarangan Mudik Lebaran 2021



kematian akibat virus ini juga semakin tinggi walaupun angka pergerakan setiap hari sudah mengalami penurunan. Imbas dari belum adanya tanda-tanda berakhirnya pandemi ini membuat pemerintah melakukan kebijakan pelarangan mudik lebaran kembali di tahun 2021. Ini adalah kali kedua pelarangan mudik lebaran bagi perantau untuk pulang ke kampung halaman berkumpul bersama sanak saudara.

Tahun 2021 pemerintah resmi melarang mudik lebaran setelah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan lembaga pada 26 Maret lalu. Ketetapan pelarangan ini berlaku pada tanggal 6-17 Mei 2021. Tujuan pelarangan mudik ini jelas untuk menghindari lonjakan kasus Covid-19 akibat mobilitas masyarakat yang terjadi saat mudik. Pelarangan mudik ini berlaku untuk semua kalangan baik ASN, TNI, Polri, Pegawai BUMN, pegawai swasta hingga masyarakat.

Pelarangan mudik 2021 jelas akan berdampak pada ekonomi di Indonesia. Beberapa dampak ekonomi yang akan dirasakan adalah yang pertama penurunan uang beredar, jumlah uang beredar pada momentum lebaran 2021 akan mengalami penurunan dikarenakan mobilitas masyarakat terbatas, namun demikian perputaran uang akan tetap ada karena dalam kebijakan ini masih diperbolehkan untuk mudik lokal dengan syarat memiliki hasil swab antigen, swab PCR atau G-Nose negatif. Kedua beberapa sektor akan terdampak penurunan omzet yang cukup signifikan yaitu sektor transportasi, hotel dan restoran, makan dan minuman serta sektor sandang.

Sektor transportasi adalah sektor yang paling terdampak akibat pelarangan mudik lebaran tahun 2021 ini karena terjadi pembatasan secara ketat terhadap pergerakan penumpang baik transportasi darat, udara maupun laut. Tidak adanya aktivitas pada sektor transportasi membuat pengusaha transportasi mengalami kerugian dan akan berimbas pada pekerja yang tidak mendapatkan THR. Namun pada sektor ini masih diperbolehkan beroperasi untuk pengiriman paket maupun logistik. Sektor hotel dan restoran juga mengalami kerugian imbas kebijakan ini. Berkurangnya aktivitas orang untuk mudik atau bepergian selama libur mudik lebaran 2021 membuat sektor perhotelan mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan.

Namun dampak penurunan ekonomi akibat pelarangan mudik lebaran 2021 ini sudah diantisipasi oleh program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dalam programnya PEN tahun 2021 lebih beragam dikarenakan anggaran yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Program yang lebih beragam ini diprediksi akan mendorong konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan sehingga masih dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pelarangan mudik tahun 2021 tetap memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. (*)